

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Pada Tahun 2019-2022

Najla Aulia Nur Ramadhianti, Cicih Widianingsih, Suci Nasehati Sunaningsih

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, Indonesia

najlaaulianr17@gmail.com, ciciwidia27@gmail.com, sucinasehati@untidar.ac.id

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa

Tengah 56116

Korespondensi email : najlaaulianr17@gmail.com

Abstract: Based on calculations in financial ratios, this study was conducted to assess the financial performance of the Sleman Regency Government in managing local original revenue in 2019–2022. Secondary data, which includes information from the Cash Flow Statement, Balance Sheet, and Budget Realization Statement, are used. It was taken from <https://ppid.slemankab.go.id> website. This study used quantitative descriptive data analysis. Referring to the results of data calculations, it shows that cooperation between the Regional Government of Sleman Province and the Central Government in recognizing and solving current problems is less than ideal.

Keywords: Effectiveness of Local Original Revenue, Fiscal Decentralization, Financial Performance, Regional Independence, Regional Financial Efficiency, Compatibility.

Abstrak: Berdasarkan perhitungan dalam rasio keuangan, penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola pendapatan asli daerah tahun 2019–2022. Data sekunder, yang mencakup informasi dari Laporan Arus Kas, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran, digunakan. Itu diambil dari situs web <https://ppid.slemankab.go.id>. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Mengacu pada hasil perhitungan data, menunjukkan jika kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sleman dan Pemerintah Pusat dalam mengenali serta menyelesaikan persoalan-persoalan terkini kurang ideal.

Kata kunci: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan, Kemandirian Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, Keresasian.

PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Republik Indonesia mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan diperlukan untuk menyajikan rincian terkait posisi keuangan dan transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan dari pemda digunakan untuk menginformasikan keputusan, sehingga laporan perlu ditulis cukup sederhana agar pembaca dapat memahaminya. Analisis laporan keuangan diperlukan untuk membantu mereka yang berjuang untuk memahami dan menafsirkan pelaporan keuangan karena dokumen ini tidak semuanya ahli akuntansi, meskipun mereka akan bergantung pada data keuangan untuk membuat keputusan.

Tiga tujuan yang dipenuhi dalam indikator kinerja sektor publik: pertama, pengukuran sektor publik ditujukan agar meningkatkan kinerja pemerintah; kedua, ukuran kinerja sektor publik dipakai dalam alokasi sumber daya dan keputusan; serta ketiga, ukuran kinerja sektor publik ditujukan agar mewujudkan akuntabilitas masyarakat dan memperbaiki kelembagaan. Penting mengukur kinerja dalam menilai akuntabilitas organisasi untuk memberikan pelayanan

publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan untuk memperlihatkan aktivitas uang publik yang dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Indikator kinerja dipakai untuk acuan dalam menjalankan penilaian kinerja, yaitu untuk mengidentifikasi keberhasilan organisasi, program, atau kegiatan.

Menurut riset Oktrivina, Siregar, dan Mariana (2020), kinerja keuangan Pemkot Depok-Jabar efektif, efisien, dan pertumbuhan pendapatan meningkat. Rasio kompatibilitas, bagaimanapun, menunjukkan bahwa biaya operasional dan modal belum didistribusikan secara merata. Kinerja keuangan Pemkab Tapanuli Pusat dinilai baik, menurut penelitian Harahap (2020), meskipun ketergantungan daerah pada lembaga eksekutif tetap tinggi, rasio derajat desentralisasi masih relatif rendah, dan pendapatan PAD kurang dari jumlah yang direncanakan. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan berbagai rasio, seperti rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah, untuk menilai kinerja pemda.

Pemkab Sleman adalah objek penelitian yang dipakai pada penelitian ini, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya pada daerah ini. Kabupaten Sleman dipilih karena merupakan salah satu pemerintah daerah dengan sejumlah daya tarik wisata dan letak geografis yang sangat menguntungkan. Mengingat kebutuhan ini, Kabupaten Sleman harus mempunyai sumber keuangan daerah relatif tinggi serta sanggup mendukung pembangunan daerah dengan kinerja keuangan yang kuat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Astuti & Nurmalarasi (2023) Kinerja Keuangan Pemda merupakan hasil dari suatu keberhasilan program dan memanfaatkan anggaran dengan ukuran tepat serta bermutu. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan, pengembangan masyarakat, dan sosialisasi tanpa secara langsung menentang lembaga eksekutif melalui kemampuan mengelola dana dalam memenuhi kebutuhan orang-orang sesuai dengan peraturan. Zulkarnain (2020) mengklaim bahwa pengukuran kinerja di sisi lain menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan dalam mengevaluasi keakuntabilisan suatu lembaga dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mahmudi (2010: 142) menyatakan bahwa "Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung melalui pembagian penerimaan total uang dari pinjaman daerah dan transfer dari pemerintah

federal, provinsi, dan lokal dengan jumlah pendapatan asli daerah. Pemda mempunyai kemandirian keuangan daerah yang besar ketika angka rasio ini lebih tinggi. Tingkat keterlibatan masyarakat pada pembangunan daerah, misal pembayaran retribusi dan pajak daerah, yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, juga digambarkan oleh rasio kemandirian (Halim, 2007).

Ukuran rasio independensi, yang menunjukkan independensi regional, juga mengarah dan menunjukkan ketergantungan regional pada pendanaan atau sumber data dari luar, terutama dari pemerintah federal dan lokal. Tingkat ketergantungan bantuan dari luar, paling utama dari pemerintah federal dan lokal, menurun seiring dengan meningkatnya kemandirian daerah dan sebaliknya (Oktrivina, Siregar & Mariana, 2020). Purwanti dan Noviyanti (2021) menegaskan bahwa, sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah sanggup melakukan pembangunan, operasi pemerintah, serta layanan masyarakatnya sendiri.

Rasio Derajat Desentralisasi

Mahmudi (2010: 142) menyatakan bahwa "jumlah PAD dan total pendapatan daerah dibandingkan untuk menentukan capaian desentralisasi." Tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada pendapatan daerah secara keseluruhan ditunjukkan oleh rasio ini. Kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi meningkat dengan kontribusi PAD. Sementara desentralisasi adalah transfer kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah, diantisipasi untuk memiliki keuntungan praktis, seperti mempromosikan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, inisiatif, dan daya cipta dalam pembangunan dan mempromosikan distribusi yang adil dari hasil pembangunan antara sumber daya dan potensi di setiap daerah (Mardiasmo 2002; 6).

Menurut Oktrivina, Siregar, dan Mariana (2020), Derajat Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan metrik yang menggambarkan sejauh mana kekuasaan dan akuntabilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemda untuk inisiatif pembangunan. Nurmalasari & Astuti (2023) menyatakan bahwa Rasio Desentralisasi Fiskal dihitung sebagai selisih dari besaran PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan desentralisasi tumbuh seiring dengan kontribusi PAD..

Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas, menurut Mardiasmo (2004: 134), yaitu indikator suatu organisasi jika berhasil ataupun gagal dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap sudah beroperasi secara efektif jika tujuannya terpenuhi.

Rasio Efektivitas membandingkan capaian yang ditentukan sesuai potensi aktual daerah dengan kemampuan pemda untuk merealisasikan PAD yang direncanakan (Halim, 2012).

Menurut Krisniawati, Zulkarnain, dan Yuliana (2021), suatu kegiatan dinilai efektif apabila berdampak signifikan terhadap kapasitas pemberian pengabdian masyarakat yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan operasi di sektor publik. Dengan perbandingan perealisasi Pendapatan Asli Daerah dan anggaran PAD, rasio ini dihitung.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hubungan antara produk dan layanan yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan sumber daya yang digunakan dikenal sebagai rasio efisiensi. Jika suatu program, organisasi, atau kegiatan dapat mencapai output yang diberikan dengan jumlah input paling sedikit, maka itu dianggap efisien. (Hertanti dan Dedi Nordiawan, 2010; 161). Rasio efisiensi (Abdul Halim, 2007; 234) adalah rasio yang menunjukkan hubungan total beban yang digelontorkan dalam memperoleh penghasilan dan penerimaan realisasi pendapatan.

Rasio efisiensi, dihitung melalui perbandingan biaya operasi dan perealisasi pendapatan yang digambarkan dalam persentase, mewakili tingkat pencapaian yang dicapai oleh pemda saat mencapai suatu tujuan. Lebih banyak efisiensi dihasilkan dari rasio yang lebih kecil, dan sebaliknya. Dalam industri pengabdian masyarakat, ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan terampil yang membutuhkan pengorbanan minimal (Krisniawati, Zulkarnain & Yuliana, 2021). Purwanti & Noviyanti (2021) menyatakan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) membedakan perealisasi pendapatan yang diterima melalui jumlah biaya yang digelontorkan untuk memperoleh penghasilan. Apabila nisbah yang diperoleh kurang dari 100%, maka kinerja keuangan pemda dalam hal pengumpulan pendapatan dinilai efisien. Semakin bagus kinerja keuangan pemda, semakin rendah rasio efisiensi keuangan daerah.

METODOLOGI

Jenis Data

Data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data sekunder, serta didapatkan dari situs web <https://ppid.slemankab.go.id/>. Ini mencakup informasi berikut: Informasi dari Laporan Arus Kas, Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran.

Teknik untuk Pengambilan Sampel

Menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama 4 tahun, dari 2019-2022, adalah temuan utama studi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu manfaat signifikan dari pengumpulan data melalui tinjauan literatur adalah

memberikan subjek akses ke semua informasi dan data yang relevan mengenai skenario dunia nyata. Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan dokumen elektronik, termasuk e-book, artikel, laporan, laporan, dll. Produk elektronik yang berasal dari database online terdiri dari bahan pustaka yang tidak perlu melakukan perjalanan ke lapangan untuk melakukan pencarian data.

Definisi Operasional Variable dan Pengukuran

Variabel operasional yaitu variabel yang didefinisikan pada skema yang dapat diterapkan, tidak berwujud, dan relevan secara operasional dalam penelitian terkait. Diantara variabel yang dipakai pada identifikasi sistem keuangan penelitian ini yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio kompatibilitas, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Teknik Analisis Data

Dalam rangka mengidentifikasi aktivitas keuangan dengan memakai data yang sudah diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang terstruktur dan akurat mengenai isu-isu yang diangkat, metodologi penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif. Teknik analisis data berikut menggunakan teknik analisis deskriptif :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Rasio Keserasian

$$\text{- Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{- Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan dilihat pada BKAD Kabupaten Sleman adalah tahapan pertama untuk menetapkan tingkat aktivitas keuangan wilayah periode 2019-2022. Rasio-rasio yang dipakai dalam mengidentifikasi cara kerja Badan Keuangan & Aset

Daerah Sleman meliputi: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kompatibilitas. Dan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman dari Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 1. Pelaporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022

Bagian	Anggaran (Rp)	Tahun			
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan	2.697.335.484	2.838.317.285.803	2.541.050.870.613	2.793.328.384.635	3.005.980.155.062
Pendapatan Asli Daerah	770.675.023.451	972.049.575.206	788.247.742.427	803.679.358.729	1.061.064.803.656
Pendapatan Transfer Dana Perimbang	1.348.958.270.965	1.371.364.974.325	1.271.979.511.950	1.366.608.643.179	1.411.087.776.251
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	147.541.745.000	170.882.517.000	73.459.098.000	147.541.745.000	139.140.652.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	423.506.342.942	243.660.619.272	271.705.395.590	454.227.185.187	388.379.064.216
Lain-lain Pendapatan Transfer	6.654.102.299	80.359.600.000	135.660.122.645	21.271.452.549	6.307.858.939
Belanja	3.063.792.544.726	2.776.995.369.322	2.532.122.645	2.714.312.898.539	3.040.474.126.755
Belanja Operasi	2.252.064.849.973	1.986.041.696.572	1.952.369.307.358	1.949.946.322.384	2.195.791.565.394
Belanja Modal	457.108.938.973	451.531.360.857	361.066.768.091	433.649.905.880	466.443.909.650
Belanja Tak Terduga	49.068.048.067	271.125.000	20.161.477.613	27.614.828.647	18.234.059.538
Belanja Transfer	305.550.707.713	339.151.186.892,49	198.571.656.123	303.101.841.633	360.004.592.173
Surplus/Defisit	-366.457.661.427	63.640.916.480,63	8.881.661.427	79.015.486.095	-34.493.971.692

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Hasil Penelitian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Cara ini dapat dipakai untuk menentukan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) :

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{PAD \times 100\%}{Pendapatan\ Transfer}$$

Jika pajak dan retribusi dibayarkan, kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan warganya sambil menegakkan kebijakannya sendiri dikenal sebagai rasio kemandirian keuangan regionalnya. Di bawah ini menampilkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

Tabel 2. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
-------	-----------------------------	--------------------------	----------	---------------

2019	972.049.575.206,45	1.788.227.110.597,00	54,36	Partisipatif
2020	788.246.742.427,73	1.617.144.005.540,00	48,74	Konsultatif
2021	803.679.358.719,08	1.968.377.573.366,50	40,82	Konsultatif
2022	1.061.064.803.656,40	1.938.607.492.467,44	54,73	Partisipatif

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Tabel 2 hasil perhitungan di atas menunjukkan jika kesanggupan keuangan Pemkab Sleman tercermin pada pola hubungan, yang meliputi konsultasi, pemberian umpan balik, dan partisipasi dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah. Nilai tertinggi, 54,73% dari nilai tertinggi pada tahun 2021, ditemukan di 2022. Hal tersebut menggambarkan tingkat ketergantungan pada pemda telah menurun.

Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal

Cara berikut ini untuk menghitung Rasio Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{PAD} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan digambarkan dengan rasio ini. Di bawah ini menampilkan perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal :

Tabel 3: Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	DDF (%)	Standar
2019	972.049.575.206,45	2.840.636.285.803,45	34,22	Sedang
2020	788.246.742.427,73	2.541.050.870.612,73	31,02	Sedang
2021	803.679.358.719,08	2.793.328.384.634,58	28,71	Cukup
2022	1.061.064.803.656,40	3.005.980.155.062,84	35,29	Sedang

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Berdasarkan perhitungan di atas, kinerja keuangan Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman memenuhi standar kinerja sedang serta memadai. Tahun 2019, rasio desentralisasi fiskal sebesar 34,22%, pada tahun 2020 turun menjadi 31,02%, di 2021 menurun menjadi 28,71% serta 2022 naik menjadi 35,29%. Mengingat berada di antara 28,71% dan 35,29% pada skala interval, rasio desentralisasi di Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman dapat dianggap baik, meskipun mengalami fluktuasi tahunan.

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah memakai cara :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{Anggaran PAD}}$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kapasitas pemda untuk melaksanakan

pendapatan asli daerah yang telah dirancang & ditetapkan terpisah pada tujuan yang telah ditetapkan mengingat potensi aktual yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah berkinerja lebih baik, semakin tinggi rasio efektivitas ini. Di bawah ini menampilkan temuan perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran (Rp)	REPAD (%)	Standar
2019	972.049.575.206,45	903.278.920.723,56	107,61	Efektif
2020	788.246.742.427,73	676.743.940.021,93	116,47	Efektif
2021	803.679.358.719,08	770.675.023.451,00	104,28	Efektif
2022	1.061.064.803.656,40	1.031.150.840.396,00	102,9	Efektif

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman di 2019–2022 efektif, sesuai perhitungan pada Tabel 4 di atas, disebabkan hasil perolehan >100%. Persentasenya 107,61% di 2019, 116,47% tahun 2020, 104,28% di 2021, serta tahun 2022 sebesar 102,9%.

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Untuk menghitung Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat menggunakan cara :

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}$$

Perbedaan jumlah uang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan jumlah aktual penerimaan pendapatan dinyatakan oleh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Tabel di bawah ini menampilkan temuan perhitungan Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah:

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2019	2.437.844.182.430,33	2.840.636.285.803,45	85,82	Kurang Efisien
2020	2.532.169.209.185,59	2.541.050.870.612,73	99,65	Kurang Efisien
2021	2.714.312.898.539,54	2.793.328.384.634,58	97,17	Kurang Efisien
2022	3.040.474.126.755,75	3.005.980.155.062,84	101,14	Tidak Efisien

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Hasil Perhitungan Rasio Kecerasan

Cara yang digunakan :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kecerasan} \\ - \text{Rasio Belanja Operasi} &= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \\ - \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Rasio Kompatibilitas menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan uang untuk modal dan biaya operasional dengan cara yang paling efisien. Tabel di bawah ini menampilkan

hasil perhitungan Rasio Kompatibilitas:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Kesesuaian (Belanja Operasional)

Tahun	Jumlah Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2019	2.768.530.601.779,77	1.986.041.696.572,86	71,74
2020	2.598.886.169.551,78	1.952.369.307.358,01	75,12
2021	3.063.792.544.726,01	1.949.946.322.378,71	63,64
2022	3.294.274.837.020,55	2.195.791.565.394,29	66,65

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Tabel 6 menyajikan rata-rata Rasio Kesesuaian Belanja Operasional Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman yang hasilnya sebesar 69,28%. Mulai 71,74% pada 2019 turun menjadi 63,64% pada 2021, meningkat menjadi 66,65% pada 2022, kemudian meningkat menjadi 75,12% pada 2020.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal)

Tahun	Jumlah Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2019	2.768.530.601.779,77	451.531.360.857,47	16,31
2020	2.598.886.169.551,78	361.066.768.091,58	13,89
2021	3.063.792.544.726,01	433.649.905.880,83	14,15
2022	3.294.274.837.020,55	466.433.909.650,46	14,15

Sumber: *Data diolah tahun 2024*

Hasil perhitungan di atas menunjukkan rata-rata Rasio Keserasian pada Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sleman, yang keluar menjadi 14,62%. Pada 2019, rasionya sebesar 16,31% menurun menjadi 13,89% pada tahun 2020. Kemudian meningkat menjadi 14,15% pada 2021–2022.

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan hasil analisis data yang sudah selesai:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman terkena dampak negatif, terindikasi dari Rasio Kemandirian Daerah. Pemerintah menggunakan saluran partisipatif dan konsultatif untuk komunikasi, beroperasi antara 25% dan 50% dan 50% dan 75% dari waktu. Dari tahun 2019 hingga 2022, rasio yang sesuai adalah 54,73%, 40,82%, 48,74%, dan 54,36%.

2. Rasio desentralisasi fiskal yang berada di antara 20,01% hingga 30,00% menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman di bawah standar. Tingkat perubahan dari 2019 ke 2022 adalah 34,22%, 31,02%, 28,71%, dan 35,29%, dalam urutan tersebut.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman berkinerja sangat efektif sesuai Rasio Efektivitas PAD, dengan persentase efektivitas sebesar 107,61% di tahun 2019, lalu tahun 2020 sebesar 116,47%, dan 104,28% di tahun 2021, serta 2022 sebesar 102,9%.

4. Rata-rata efisiensi keuangan Pemkab Sleman tahun 2019 hingga 2022 sebesar 95,97% dapat dianggap tidak efisien berdasarkan Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio yang sesuai yaitu 85,82%, 99,65%, 97,17%, dan 101,14%.

5. Karena belanja modal lebih rendah dari belanja usaha, menjadikan kinerja keuangan Pemkab Sleman kurang stabil dari tahun ke tahun apabila data dari compatibility ratio akurat. Tingginya rata-rata pengeluaran operasional sebesar 69,25% disebabkan oleh besarnya jumlah pengeluaran karyawan dan meningkatnya jumlah karyawan. Namun, terbukti dengan rasio belanja modal rata-rata sekitar 14,57%, Pemerintah Kabupaten Sleman terus gagal memberikan dukungan penuh bagi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Among Makarti*, 14(2), 1-12. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61-74.

Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572>

Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11-20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>

Siregar, A. O. D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE : Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 8-9.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman 2018*.

Laporan-Realisasi-Anggaran-Kabupaten-Sleman-TA-2020.pdf. (n.d.).

<https://bkad.slemankab.go.id/informasi-publik/>

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mahsun. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulawati Tan. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syamsi. (2019). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hertianti, & Deddi, N. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusufi, A. H. (2012). *Teori Konsep dan Implikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.